

Evaluasi Model Pemberdayaan Koperasi INTAKO Pada UMKM di Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo Sebagai Upaya Pencegahan Kemiskinan

Aisyah Aminy, Darsono Wisadirana, Hotman M. Siahaan
Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
aisyah.pns@gmail.com

Abstract: *The role of SME's is so great to economic growth and prevent poverty. SME's contribute to achieving 54.34% of the total Gross Domestic Product (GDP) of East Java in 2012. Behind his potential, SME's have constraints and limitations both internally and externally so that empowerment needs to be done. Centers or clustering approach is considered an appropriate strategy for empowering SME's. Industrial centers Bags and Luggage was have empowerment model to maximize the development of centers, with the occurrence of Cooperative INTAKO. Therefore, the purpose of this study was (1) to description of Cooperative INTAKO empowerment model on SME's that have been implemented in the industrial centers of bags and suitcases was, (2) to identify the factors that influence the effectiveness of the empowerment model, and (3) Formulate a model of cooperative empowerment INTAKO effective in SME's in these centers in the prevention of poverty. The results showed the need for modifications to the various programs that have been run by the Cooperative INTAKO as a form of empowerment to its members. With modifications empowerment model INTAKO Cooperative is expected to be an effort to prevent poverty, especially for micro businesses.*

Keywords: *SME's, Poverty, Empowerment, Center of SME's and Cooperatives.*

Abstrak: Peranan UMKM yang begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan mencegah kemiskinan. UMKM memberikan kontribusi yang mencapai 54,34% terhadap total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada Tahun 2012. Dibalik potensinya, UMKM memiliki kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal sehingga pemberdayaan perlu dilakukan. Pendekatan sentra atau *clustering* dianggap merupakan strategi yang tepat untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo memiliki model pemberdayaan untuk memaksimalkan pengembangan sentra yaitu dengan adanya Koperasi INTAKO. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan model pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM yang sudah dijalankan di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas model pemberdayaan tersebut, dan (3) menyusun formulasi model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif pada UMKM di sentra tersebut dalam pencegahan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya modifikasi pada berbagai program yang selama ini dijalankan oleh Koperasi INTAKO sebagai bentuk pemberdayaan kepada anggotanya. Dengan modifikasi model pemberdayaan Koperasi INTAKO tersebut diharapkan menjadi sebuah upaya pencegahan kemiskinan terutama bagi pelaku usaha mikro.

Kata kunci: **UMKM, Kemiskinan, Pemberdayaan, Sentra UMKM, dan Koperasi**

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi antar daerah, antar-sektor, dan antar golongan penduduk (Sumodiningrat, 1998: 26).

Salah satu sektor yang berperan dalam menangani masalah kemiskinan adalah sektor

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Agus P (2007) dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa UMKM mampu memberi kesempatan kerja pada jutaan penduduk di Indonesia yang tidak tertampung di sektor formal atau sektor usaha besar. Karakteristik UMKM juga sesuai dengan karakteristik penduduk miskin yang berpendidikan rendah. Di Jawa Timur, peranan UMKM ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu menurun menjadi 4,25% pada

Tahun 2010, Tahun 2011 tinggal 4,16%, dan Tahun 2012 tinggal 4,12%. Selain itu UMKM juga memberikan kontribusi yang mencapai 54,34% terhadap total nilai PDRB Jawa Timur pada Tahun 2012. Akan tetapi, dibalik potensinya UMKM memiliki kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan: modal, teknik produksi, pangsa pasar, manajemen, dan teknologi, serta lemah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah seperti persoalan perizinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan. Oleh karena itu pemberdayaan UMKM tetap menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Perda No.6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa pemberdayaan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam bentuk: fasilitasi permodalan, dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain, pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah, dan fasilitasi HAKI.

Tambunan (2009: 109) menyebutkan bahwa pendekatan strategi yang tepat untuk melakukan pemberdayaan UMKM adalah melalui *clustering*, yaitu dengan program pengembangan klaster-klaster (sentra-sentra) UMKM. Ada tiga keuntungan utama dari *clustering* tersebut yaitu: pertama, UMKM lebih mudah mengatasi keterbatasannya dibandingkan jika beroperasi sendiri-sendiri. Kedua, lebih efisien dan efektif dalam pemberian bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, proses peralihan teknologi/ pengetahuan menjadi lebih gampang, efisien, dan efektif.

Menurut Permen Koperasi dan UKM RI No: 23/PER/M.KUKM/XI/2005 menyebutkan bahwa sentra adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/ lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/ sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/ sejenis dengan kriteria minimal terdapat 20 UKM, mengutamakan bahan baku lokal (dalam negeri), mempunyai jaringan dalam pengadaan bahan baku maupun pemasaran, dan mampu menyerap tenaga kerja minimal 40 orang. Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo merupakan salah satu sentra tas terbesar di Indonesia. Di sentra tersebut, terdapat sebuah koperasi yang bernama Koperasi INTAKO yang berfungsi memberikan berbagai program kegiatan sebagai bentuk pemberdayaan pada UMKM sehingga dapat menghilangkan ketidakberdayaan pada anggotanya dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan sentra tersebut.

Ketidakberdayaan UMKM terlihat saat mereka diserang oleh produk-produk impor terutama barang Cina sebagai akibat dari adanya kebijakan yang tidak berpihak pada UMKM yang menyebabkan omset menurun terutama bagi pelaku usaha mikro yang sangat rentan dengan kondisi kemiskinan. Koperasi INTAKO sebagai salah satu bentuk kelembagaan yang dipilih memiliki tujuan yaitu mensejahterakan seluruh anggota dengan asas gotong royong serta kekeluargaan. Koperasi melakukan kegiatannya dengan prinsip sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam sebuah koperasi anggota adalah pemilik dan pemakai yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga dituntut berperan aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Peranan anggota dalam sebuah koperasi sesuai dengan paradigma pembangunan *people centered development*.

Korten (2001: 110) mendefinisikan pembangunan berpusat pada rakyat adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan insti-

tusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Definisi tersebut mencakup asas keadilan, berkelanjutan, dan ketercakupan. Menurut Korten (2001: 110) hanya rakyat sendiri yang bisa menentukan apa sebenarnya yang mereka anggap sebagai perbaikan dalam kualitas hidup mereka.

Asas, prinsip, dan nilai dalam koperasi jika betul-betul diterapkan akan melahirkan efek sinergis yang sangat diperlukan dalam pengembangan UMKM dalam sebuah sentra dan UMKM dapat menikmati apa yang disebut keuntungan ekonomi aglomerasi sehingga pemberdayaan pada UMKM di sentra bisa berjalan efektif. Model pemberdayaan melalui Koperasi di sentra UMKM diharapkan dapat mencegah pelaku UMKM dari kemiskinan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan model pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM yang sudah dijalankan di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model pemberdayaan tersebut, dan (3) menyusun formulasi model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif pada UMKM di sentra tersebut dalam pencegahan kemiskinan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan model pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh Koperasi INTAKO. Pemberdayaan oleh Koperasi INTAKO pada UMKM di sentra tersebut akan dievaluasi dengan model Fujikake (2008), kemudian dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas model sehingga didapatkan sebuah model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin, Sidoarjo sebagai upaya mencegah kemiskinan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang menjadi informan adalah pelaku UMKM anggota Koperasi INTAKO; Diskoperindag dan ESDM Kab. Sidoarjo; Konsultan BDS Provinsi Jawa Timur; dan pengurus Koperasi INTAKO sehingga didapat kejenuhan data dalam penelitian. Selain itu, teknik lain yang digunakan adalah dengan melakukan observasi lapangan terhadap program-program pemberdayaan yang pernah dilakukan oleh Koperasi INTAKO pada UMKM di Sentra Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo termasuk terhadap partisipasi pelaku UMKM anggota koperasi dalam pemberdayaan tersebut, dan pengumpulan dokumen yang terkait.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganut cara yang digunakan dalam pendekatan kualitatif sebagaimana yang disampaikan oleh (Milles dan Huberman, 2014: 31) yang dibagi dalam tiga alur kegiatan yaitu (1) Kondensasi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan. Data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi kemudian dilakukan proses seleksi data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data sehingga didapatkan data yang lebih berbobot. Kemudian data hasil kondensasi tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif, dianalisis dan dibahas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan akhir dari penelitian.

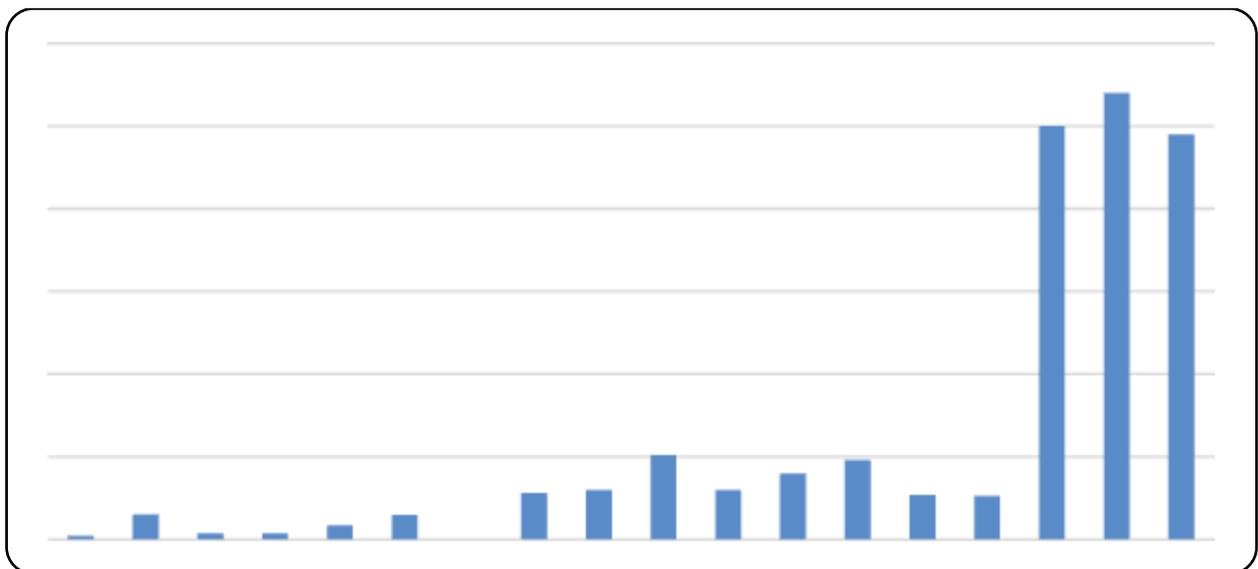
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentra Tas dan Koper Tanggulangin adalah pusat kegiatan bisnis terutama tas dan koper (saat ini *trolley*) di kawasan/ lokasi tertentu yaitu di Kecamatan Tanggulangin dimana terdapat UMKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama dan menghasilkan produk yang sama. Sentra Tas dan Koper

Tanggulgingin bermula dari adanya 5 (lima) orang pemuda Desa Kedensari yang awalnya bekerja sebagai buruh pabrik koper di Surabaya yang kemudian memutuskan untuk mendirikan usaha pembuatan koper sendiri karena keinginan yang sangat kuat untuk berubah menjadi seorang pengusaha. Oleh karena itu, pada tanggal 7 April 1976 terbentuklah Koperasi INTAKO, yang merupakan kepanjangan dari Industri Tas dan Koper. Waktu itu, para pengrajin yang mau bergabung adalah 27 orang dari 100 orang pengrajin, dengan simpanan pokok Rp.5.000,00.

Koperasi INTAKO merupakan wadah pemersatu yang dipilih oleh para pengrajin di sentra industri tas dan koper Tanggulgingin untuk memudahkan mereka menjalankan aktivitas bisnisnya sehingga tercipta UMKM yang mandiri. Anggota di Koperasi INTAKO terdiri dari berbagai skala usaha, yaitu usaha

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Anonim (2012: 4) menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori. UMKM yang bergerak di sektor industri pengolahan, kaidah pendefinisian mengikuti definisi BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja. Sedangkan yang nonindustri, pendefinisian mengikuti Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Untuk industri pengolahan, pengelompokannya sebagai berikut: (1) Industri yang termasuk usaha mikro adalah industri/ usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1 – 4 orang; (2) Industri yang termasuk usaha kecil adalah industri yang mempunyai pekerja 5 - 19 orang; (3) Industri yang termasuk usaha menengah adalah industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang.



Gambar 1. Grafik Omset Penjualan UMKM dalam Satu Bulan.

Sedangkan yang nonindustri, menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang disebut UMKM adalah sebagai berikut: (1) Usaha mikro memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00; (2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan Rp.300.000.000,00 s.d Rp.2,5 miliar; dan (3) Usaha menengah memiliki kekayaan bersih Rp.500.

000.000,00 s.d Rp.10 miliar atau hasil penjualan tahunan Rp.2,5 miliar s.d Rp.50 miliar.

Karakteristik Pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Sentra Tas dan Koper Tanggulgingin Sidoarjo memiliki pola perilaku yang berbeda tetapi dapat diklasifikasikan berdasarkan skala usahanya apakah mikro, kecil, dan menengah. Dari gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan yang lebar antara pelaku usaha mikro dan kecil

dengan pelaku usaha menengah. Informan dengan skala usaha mikro memiliki omset penjualan antara Rp.2.250.000,00 hingga Rp.15.000.000,00. Ada 2 (dua) klasifikasi dalam pelaku usaha mikro tersebut yaitu informan yang membuat produknya sendiri dan informan yang sudah tidak membuat produk sendiri atau mengerjakan produk dari *juragan*. Pelaku usaha paling mikro yang tidak membuat produk sendiri merupakan orang-orang yang terpinggirkan dalam persaingan bisnis sehingga mereka sudah tidak membuat produk sendiri dan hanya mengandalkan adanya pekerjaan dari *juragannya* dengan diberi ongkos kerja/sistem borongan. Pelaku usaha paling mikro yang sudah tidak membuat produk sendiri merupakan akibat dari ketidakmampuan pelaku usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha dalam istilah Chambers (1987) mereka terkena perangkap kemiskinan.

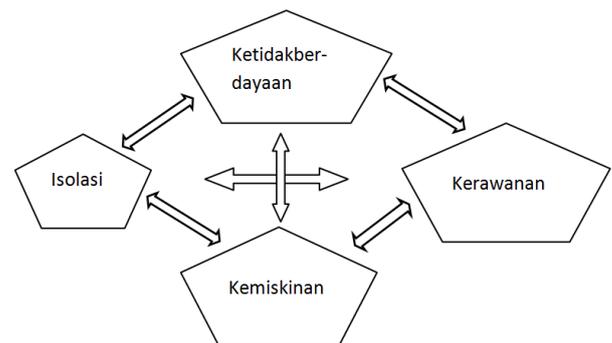
Klasifikasi yang kedua adalah yang disebut usaha kecil yaitu informan 8-15 yang omset penjualannya antara Rp.26.250.000,00 hingga Rp.51.000.000,00. Pelaku usaha kecil sudah memiliki tingkat keberdayaan lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro sehingga menurunnya penjualan di Koperasi INTAKO atau sentra tas dan koper Tanggulangin tidak memberikan dampak pada usaha mereka. Ada beberapa faktor penyebabnya antara lain: memiliki pasar khusus bahkan ada yang mengerjakan pesanan untuk pasar luar negeri, memiliki tenaga kerja yang sudah mereka percayai sehingga bisa melakukan ekspansi pasar, mendapatkan informasi yang lebih banyak, mengikuti perkembangan model tas/produk lainnya, serta mencari sumber modal lain bila memang diperlukan.

Klasifikasi ketiga adalah yang disebut usaha menengah yaitu informan 16-18 dengan omset penjualan lebih dari Rp.200.000.000,00 perbulan. Pelaku usaha menengah tersebut memiliki tenaga kerja yang banyak yaitu 15 – 50 orang. Selain itu, para pelaku usaha menengah tersebut dalam pemasaran produknya menggunakan jasa sales meskipun *freeland* sehingga wilayah pemasarannya juga lebih luas bahkan sampai ke luar pulau dan ada yang memiliki toko di sentra tas dan koper Tanggulangin. Selain itu, kelayakan usaha dari pelaku usaha menengah ini sangat

mendukung apabila mereka ingin menambah modal usaha dengan memanfaatkan kredit dari bank.

Pelaku Usaha Paling Mikro dalam Perangkap Kemiskinan Chambers

Chambers (1987: 133) menjelaskan bahwa terdapat lima faktor penyebab kemiskinan yang saling terkait dengan menggambarkan kelima unsur tersebut dalam suatu mata rantai. Mata rantai ini disebut perangkap kemiskinan yang meliputi ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weaknesses*), kemiskinan (*poverty*) dan keterasingan (*isolation*). Akan tetapi para pelaku usaha ini tidak mengalami kelemahan fisik akibat kemiskinan yang dideritanya. Berikut akan dianalisis kekuatan dari tiap mata rantai tersebut sehingga membelenggu pelaku usaha paling mikro. Gambar 2 menggambarkan skema perangkap kemiskinan yang dialami oleh pelaku usaha paling mikro.



Sumber: Hasil Penelitian

Gambar 2.Skema Perangkap Kemiskinan Pelaku Usaha Paling Mikro

Kemiskinan, merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Kemiskinan yang dialami oleh pelaku usaha paling mikro tersebut meliputi tidak adanya modal yang bisa diputar untuk usaha karena antara pendapatan dan pengeluaran tidak ada sisa, dalam istilah informan disebut cukup. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga sedangkan untuk perputaran usaha, mereka mengandalkan modal dari *juragan*. Tidak adanya modal tersebut, menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan usahanya. Untuk mengurangi ongkos produksi, mereka menggunakan

tenaga kerja dari anggota rumah tangganya sendiri yaitu istri, orang tua, atau anaknya. Pendapatan kotor yang diperoleh dari hasil usaha mereka merupakan pendapatan bersama dari seluruh tenaga kerja dan pengrajin.

Kelemahan fisik atau jasmani dalam pengertian Chambers adalah kondisi fisik/lemah akibat dari kemiskinan karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang kecil, kekurangan gizi sehingga daya tahan tubuh rentan terhadap infeksi dari serangan penyakit (Chambers, 1987: 133). Kondisi tersebut tidak dialami oleh pelaku usaha mikro karena sifat kerjanya yang fleksibel dan adanya jaminan dari *juragan* terkait kebutuhan uang untuk kebutuhan rumah tangganya meskipun menyebabkan ketidakberdayaan pada mereka. Jika mereka merasa capek/ tidak enak badan, maka mereka akan beristirahat dulu sehingga kondisi jasmani dan kesehatan mereka bisa dijaga. Sedangkan bila mereka terkena *deadline* dari *juragan* sedangkan kondisi jasmani tidak memungkinkan untuk lembur maka mereka akan meminta bantuan kepada temannya dengan memberi dia upah yang sesuai.

Isolasi; Kemiskinan menyebabkan terisolasinya pelaku usaha paling mikro. Kondisi mereka yang miskin menyebabkan mereka terisolasi dari bantuan kredit yang disediakan oleh pemerintah karena termasuk dalam usaha yang tidak layak untuk menerima kredit/pinjaman. Sebagai akibatnya mereka mencari pinjaman lain jika mereka benar-benar membutuhkan tambahan modal entah dari koperasi, *juragan*, atau rentenir sekalipun.

Kerawanan atau kerentanan, adalah salah satu mata rantai yang paling banyak mempunyai jalinan. Faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan, seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha paling mikro yaitu dengan menggadaikan BPKBnya untuk mendapatkan pinjaman uang untuk digunakan sebagai modal usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun dengan bunga yang lumayan besar karena desakan waktu. Apalagi jika ada anggota keluarga yang sakit, maka sangat berdampak pada usaha mereka. Uang tabungan yang sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki tabungan menjadikan

mereka sebisa mungkin tidak boleh sakit, karena jika ada anggota keluarga yang sakit maka produksi pun berkurang begitu juga pemasukan. Selain itu, kerentanan pelaku usaha mikro ini terlihat dari kondisi usaha mereka setelah adanya kebijakan perdagangan bebas. Sebelum adanya kebijakan tersebut, pelaku usaha mikro masih melakukan produksi untuk membuat tas sendiri untuk dipasarkan ke Koperasi INTAKO, ke *showroom-showroom* di Kludan, atau yang lainnya.

Ketidakberdayaan, mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, antara lain yang terpenting adalah pemerasan oleh kaum yang lebih kuat, seperti yang dilakukan *juragannya*. Pelaku usaha paling mikro tersebut seringkali *ngebon* dulu jika sangat membutuhkan uang bahkan terkadang saat pekerjaan selesai mereka tidak mendapatkan gaji karena sudah habis dipotong *bon* tadi. Adanya ketergantungan tersebut menjadikan mereka tidak bisa menuntut upah yang layak. Adanya kebijakan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau BBM yang tentunya berpengaruh terhadap pengeluaran pelaku usaha mikro menjadikan mereka semakin tidak berdaya. Apalagi mereka tidak bisa menuntut kenaikan ongkos produksi dari *juragan*. Ketidakberdayaan mereka menjadikan pelaku usaha mikro semakin terperangkap dalam kemiskinan.

Kondisi pelaku usaha mikro yang rentan dengan kemiskinan bahkan ada dari pelaku usaha mikro yang sudah terperangkap dalam kemiskinan yaitu mereka yang tidak membuat produk sendiri merupakan akibat dari ketidakberdayaan mereka untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kondisi tersebut jika dilihat dari penyebab kemiskinan termasuk dalam kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Suyanto dan Karnaji, 2012: 8). Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sebenarnya sudah ada meliputi fasilitasi permodalan dengan adanya KUR dengan bunga 6% per tahun, Pameran untuk membantu pemasaran produk UMKM, maupun fasilitasi legalitas. Akan tetapi, fasilitas-fasilitas tersebut tidak

dapat dinikmati oleh pelaku usaha mikro karena kondisi usaha mereka yang tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan yang ada. Sehingga yang menikmati fasilitas tersebut hanya pelaku usaha yang sebetulnya sudah berdaya dan mereka hanya membutuhkan sedikit bantuan untuk mengembangkan usahanya.

Model Pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM di Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo

Pemberdayaan mutlak diperlukan untuk menjadikan UMKM bisa berdaya menghadapi persaingan dengan usaha besar. Ada beberapa definisi mengenai konsep pemberdayaan. Menurut Pranarka (1996: 56) pemberdayaan didefinisikan sebagai proses memberikan *power* kepada yang *powerless*. Manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri. Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan adalah upaya menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan karena paradigma sekarang adalah memusatkan perhatian pada manusia dan kebutuhannya menurut ukuran mereka sendiri dan bukan yang diperkirakan para praktisi pembangunan (Pranarka, 1996: 59). Definisi tersebut sejalan dengan pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusatkan pada manusia (*people centered development*) yaitu proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. (Korten, 2001: 110).

Definisi pemberdayaan tersebut secara ideal sebaiknya diimplementasikan pada model pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin sehingga tercipta tujuan pemberdayaan yaitu masyarakat yang berdaya, sesuai dengan asas pembangunan berpusat pada rakyat yaitu asas keadilan, berkelanjutan, dan ketercakupan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dideskripsikan model pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh Koperasi INTAKO pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo. Pemberdayaan ekonomi lokal dengan konsep

sentra industri seperti di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo ini merupakan konsep yang efektif karena pemenuhan kebutuhan UMKM di sentra tersebut bisa dipenuhi secara kolektif. Koperasi INTAKO merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh pengrajin di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo untuk memaksimalkan fungsi tersebut.

Pemberdayaan UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin dilakukan dengan adanya berbagai program yang dibuat oleh Koperasi INTAKO sebagai wadah pemberdayaan bagi anggotanya sehingga tercipta UMKM yang berdaya, mandiri, dan berdaya saing sehingga dapat berperan aktif dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program kegiatan dalam rangka pemberdayaan UMKM dilaksanakan dalam bentuk pemberian kemudahan dalam hal pengadaan bahan baku, permodalan, pemasaran, dan pelatihan ketrampilan. Berbagai program tersebut diwujudkan oleh Koperasi INTAKO dalam bentuk bidang usaha koperasi dengan aturan dan pedomannya dibuat melalui kesepakatan anggota saat diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang merupakan forum tertinggi dalam sebuah koperasi. Anggota diajak ikut berpartisipasi dalam penyusunan aturan dan pedoman tersebut dengan tujuan untuk menjalin keterkaitan emosi antara anggota dan koperasi sehingga tercipta rasa memiliki koperasi pada tubuh anggota dan anggota dapat berperan aktif dalam pengembangan koperasi. Anggota menjadi subyek dalam pembangunan koperasi.

Berbagai macam program kegiatan dalam rangka pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut: **Pertama**, penyediaan bahan baku yang diperlukan oleh UMKM baik secara *cash* maupun berutang (pinjam bahan) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Fasilitas tersebut diadakan dengan tujuan untuk memudahkan anggota dalam pemenuhan bahan baku produksi dan membantu dalam perputaran modal karena anggota bisa berutang dulu. Anggota dengan skala usaha mikro dan kecil sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut karena dapat mengefisienkan waktu dan tenaganya untuk kegiatan produksi dan dapat

memutarkan modalnya untuk kepentingan lainnya.

Program kegiatan **kedua** adalah dalam hal permodalan. Koperasi INTAKO memberikan akses bantuan modal melalui KSP INTAKO, meskipun bukan satu manajemen dengan Koperasi INTAKO tetapi setiap anggota Koperasi secara otomatis menjadi anggota koperasi tersebut. Pemanfaatan fasilitas permodalan lebih dirasakan oleh pelaku usaha mikro karena persyaratan yang sangat mudah yaitu dengan jaminan rasa kepercayaan dan proses pencairan yang cepat. Berbeda dengan proses pinjaman di bank/ dana bergulir dari pemerintah/ LKM lainnya yang membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu dimana pelaku usaha mikro tidak mencukupinya.

Program kegiatan **ketiga** adalah fasilitas pemasaran produk-produk anggota. Koperasi INTAKO memiliki *showroom* yang digunakan untuk memamerkan produk anggota untuk dijual kepada masyarakat. *Showroom* tersebut sangat membantu anggota dalam pemasaran produknya. Dalam fasilitas pemasaran tersebut, ada perlindungan lain yang diberikan yaitu adanya sistem kuota dan sistem konsinyasi yang diterapkan oleh Koperasi INTAKO kepada anggota dalam menitipkan produknya. Sistem kuota memberikan batasan maksimal bagi anggota untuk menitipkan produknya sebesar simpanan pokok yaitu Rp.4.000.000,00 dan keuntungannya adalah pembayaran diberikan secara langsung (*cash*) kepada anggota sesuai jumlah pengiriman produk. Sedangkan sistem konsinyasi adalah pengiriman barang maksimal Rp.30.000.000,00 tetapi pembayaran dilakukan jika ada barang yang laku tiap bulannya. Adanya dua sistem tersebut memberikan keleluasaan bagi anggota untuk memilih sistem penitipan barang di Koperasi INTAKO dengan menyesuaikan pada kemampuan produksi dan modalnya untuk mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Program kegiatan **keempat** adalah pemberian pendidikan dan pelatihan kepada anggota. Koperasi INTAKO melakukan kerjasama baik dengan pemerintah/ BUMN/ lembaga lainnya untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya. Pelatihan

dan pendidikan yang sering dilakukan adalah berupa pelatihan manajemen, pola, desain, teknik produksi, IT, dan kesehatan. Adanya pelatihan tersebut merupakan bentuk penguatan yang diberikan oleh Koperasi INTAKO kepada anggotanya sehingga mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri anggota yang menunjang kemandirian mereka.

Program kegiatan yang **kelima** adalah penerapan sistem *waiting list* dalam pemberian pesanan produk dari koperasi kepada anggota. Apabila Koperasi INTAKO mendapatkan pesanan lepas maka pengurus yang menentukan siapa yang akan mengerjakan pesanan tersebut dengan menggilir rata pada semua anggota. Sistem tersebut digunakan untuk memelihara kondisi antar anggota sehingga tidak terjadi konflik dan adanya pemerataan bagi anggota. Akan tetapi, sistem tersebut menjadikan anggota dengan skala mikro tidak mempunyai prioritas untuk mendapatkan pengerjaan pesanan padahal mereka yang sangat membutuhkan itu untuk kelangsungan hidup mereka. Ada beberapa alasan anggota skala mikro tidak mendapatkan prioritas yaitu: (1) mereka tidak memiliki pekerja, sehingga tenaga produksi terbatas, (2) selain di Koperasi INTAKO, pengrajin mikro tersebut juga memiliki *juragan* yang memberikan pesanan secara rutin sehingga saat Koperasi INTAKO menawarkan pengerjaan pesanan, mereka masih memiliki tanggungan dengan *juragannya*. Oleh karena itu, modifikasi program kegiatan perlu dilakukan agar pemberdayaan dapat maksimal.

Evaluasi Model Pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM di Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo

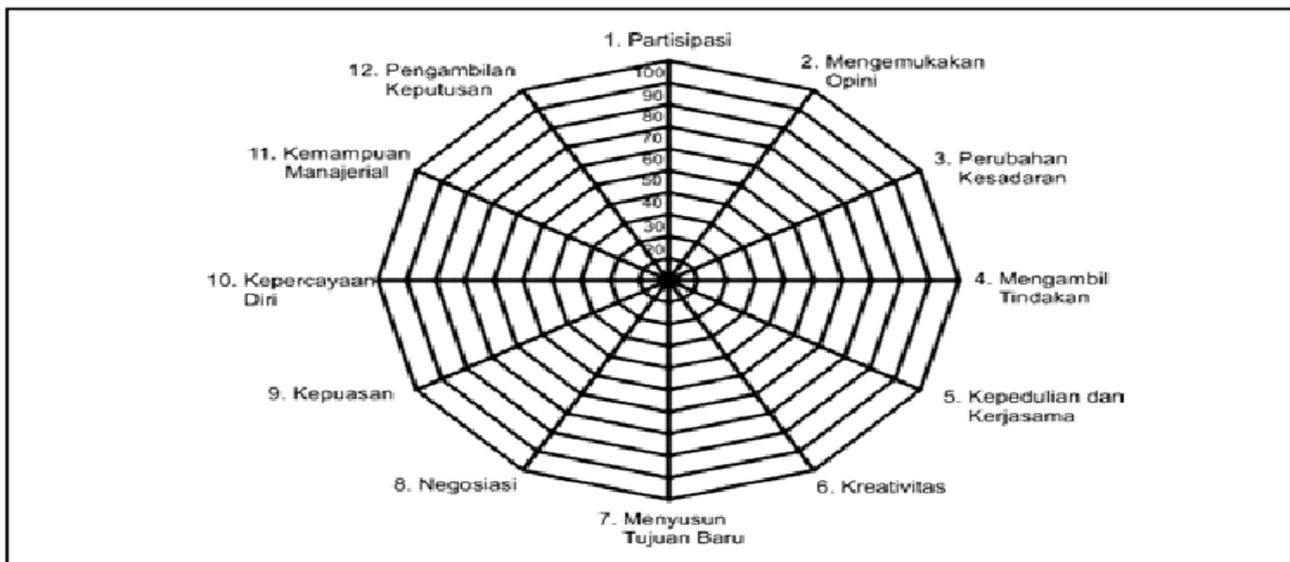
Koperasi INTAKO dibentuk oleh inisiatif dari beberapa pengrajin di Desa Kedensari yang ingin mengubah nasib menjadi seorang pengusaha tas dan koper sehingga bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Koperasi INTAKO bukan *bentukan* dari Pemerintah tetapi murni dari keinginan masyarakat yang sadar akan potensi dirinya, Pemerintah dalam hal ini Diskoperindag Kab. Sidoarjo memberikan bantuan dalam hal pengurusan legalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pentahapan pembentukan Koperasi

INTAKO berada pada tahap emansipatif, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat (Priyono dan Pranarka, 1996: 2).

Selanjutnya model pemberdayaan pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin akan dilakukan evaluasi pemberdayaan dengan menggunakan model evaluasi pemberdayaan Fujikake (2008). Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk analisis yang bisa digunakan untuk mengukur derajat keberdayaan suatu masyarakat. Pendekatan analisis yang digunakan oleh Fujikake (2008) dalam mengevaluasi pemberdayaan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencoba memahami pencapaian pemberdayaan dari pandangan masyarakat sebagai pelaksana program. Pendekatan ini mencoba memahami hubungan antara

Koperasi INTAKO karena mereka menyadari bahwa pencapaian tujuan untuk menjadi UMKM yang mandiri ditentukan oleh dirinya sendiri, Koperasi INTAKO hanya memfasilitasi. Apalagi dalam sebuah koperasi anggota adalah pemilik dan pemakai sehingga kemajuan Koperasi sangat tergantung dari partisipasi anggota.

Selanjutnya Tahap kedua adalah menilai tanggapan masyarakat dan praktek pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap 12 indikator dari proses pemberdayaan. Kedua belas indikator yaitu tingkat partisipasi, Mengemukakan opini, perubahan kesadaran, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, Kemampuan Manajerial, dan Pengambilan Keputusan.



tanggapan anggota koperasi dengan tujuan pemberdayaan itu sendiri untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu. Ada 4 (empat) langkah dalam mengevaluasi pemberdayaan menurut Fujikake (2008).

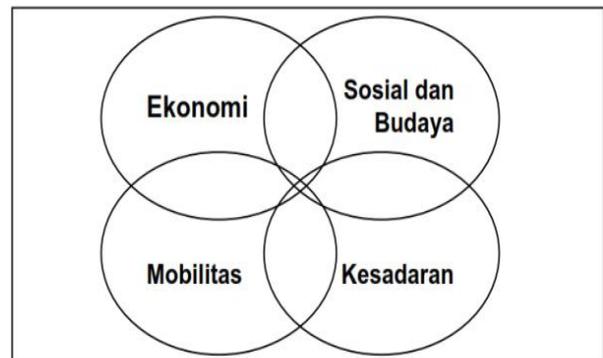
Tahap pertama adalah melihat perubahan tingkat kesadaran pelaku UMKM dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi INTAKO. Dari analisis program kegiatan yang dijalankan oleh Koperasi INTAKO dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku UMKM anggota Koperasi INTAKO tingkat kesadarannya sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dari partisipasi mereka dalam program kegiatan yang dijalankan oleh

Gambar 3. Evaluasi Pemberdayaan menggunakan 12 Indikator
Sumber: Fujikake, 2008

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan Koperasi INTAKO kepada anggota belum memberikan hasil yang maksimal yang ditunjukkan dari partisipasi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha menengah yang mengalami penurunan terutama dalam hal pemasaran dan manajemen koperasi terutama manajemen pembukuan dan keuangan juga belum maksimal. Hal ini karena bagi pelaku UMKM, manajemen usaha adalah nomor yang kedua. Pelaku UMKM adalah seorang *one man show* padahal dengan membuat buku

pembukuan maka mereka dapat mengontrol usahanya. Dalam indikator kreativitas, produk anggota Koperasi INTAKO masih belum memiliki diversifikasi dengan produk lain baik produk dalam negeri maupun produk tas impor dari luar negeri. Hal ini karena teknik membuat model adalah dengan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi). Para informan tersebut mengakui bahwa mereka mendapatkan model dari majalah, internet, atau sengaja mereka beli untuk dimodifikasi. Teknik tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko pasar artinya jika mereka menggunakan model baru yang didesain sendiri belum tentu pasar menerima. Dalam teori sosiologi, tindakan pelaku UMKM tersebut berdasarkan pilihan rasional karena tindakan mereka berdasarkan tujuan yaitu agar produk mereka disukai konsumen, dan ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi) yaitu modifikasi model dilakukan sehingga tidak sama persis karena jika sama maka termasuk *plagiasi*. Coleman dalam Ritzer dan Goodman (2004: 394-395) menyebutkan ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional yaitu aktor dan sumber daya. Dalam hal ini yang menjadi aktor adalah pelaku UMKM baik itu skala usaha mikro, kecil, maupun menengah. Sedangkan untuk unsur kedua yang membentuk tindakan tersebut adalah dari sumber daya terutama sumber daya manusianya yaitu tingkat keahlian dari pelaku UMKM dan latar belakang pendidikannya. Pelaku UMKM tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam hal desain maupun manajemen bisnis, kemampuan tersebut didapatkan secara otodidak dari proses belajar turun-temurun serta pengalaman. Untuk pendidikan 65% tamat SMA, 29% tamat SMP, dan 6% tamat SD sehingga untuk membuat sebuah inovasi produk dan model baru sulit dilakukan.

Tahap ketiga dalam evaluasi pemberdayaan Fujikake (2008) adalah dengan mengelompokkan dan menghubungkan antar indikator yang telah dianalisis pada model 2 sehingga didapat grafik antar keterkaitan elemen dalam pemberdayaan yaitu ekonomi, sosial dan budaya, kesadaran, dan mobilitas seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Model 3, Empat Elemen Pemberdayaan di Koperasi INTAKO
Sumber: Fujikake, 2008

Dari analisis 12 indikator tersebut, didapatkan bahwa empat elemen pemberdayaan tersebut sudah ada keterkaitan tetapi belum maksimal.

Tahap keempat adalah mengukur tingkatan pencapaian pemberdayaan itu sendiri. Fujikake (2008) menggolongkan tingkatan pemberdayaan menjadi 3 (tiga) aras, tingkatan pemberdayaan tersebut juga disebutkan dalam Suharto (2010: 66) menyebutkan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan yaitu: asas mikro, asas mezzo, dan asas makro. Dari analisis diatas serta observasi dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo berada pada tingkatan meso level, yaitu masih pada tataran lokal belum sampai pada suatu kebijakan/ sistem nasional. Suharto (2010; 66) menyebutkan bahwa pada tingkat meso, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi INTAKO belum memberikan hasil yang maksimal kepada anggota.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Model Pemberdayaan

Faktor yang mempengaruhi efektifitas model pemberdayaan Koperasi INTAKO UMKM di sentra industritas dan koper Tang-

gulangin Sidoarjo berdasarkan hasil observasi di lapangan dan interview pada beberapa informan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Ada 6 faktor penghambat yaitu (1) adanya kebijakan makro dari Pemerintah yang tidak berpihak pada UMKM misalnya diberlakukannya kebijakan AFTA di Indonesia mengakibatkan omset INTAKO mengalami penurunan mulai Tahun 2004, (2) adanya bencana lumpur lapindo di Tahun 2006, (3) adanya persaingan produk-produk sejenis terutama di kawasan sentra industri tas dan koper Tanggulangin terutama para pengusaha besar yang memiliki *showroom*, (4) sistem di Koperasi INTAKO yang tidak transparan dan prosedural sehingga pengurus dapat melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya, (5) adanya konflik antar anggota yang menyebabkan tidak adanya homogenitas kepentingan anggota, dan (6) keterbatasan SDM meliputi keahlian atau tingkat pendidikan pekerja dan keahlian pengelola koperasi yang diperoleh secara otodidak secara turun-temurun dari orang tua/saudara mereka.

Sedangkan untuk faktor pendorong, ada 7 (tujuh) yang mempengaruhi efektivitas model yaitu (1) wadah kelembagaan yang dipilih oleh UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin adalah koperasi yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap anggotanya baik itu anggota dengan skala mikro, kecil maupun menengah sehingga suasana atau iklim yang ada di Koperasi INTAKO akan memungkinkan anggotanya dapat berkembang secara optimal, (2) pendirian Koperasi INTAKO sudah menerapkan fase emansipatif sehingga memberikan keterikatan emosi antar subyek pembangunan, (3) aturan, visi, dan misi Koperasi INTAKO dibuat atas dasar kesepakatan anggota pada waktu RAT, (4) sistem penerimaan produk barang jadi sudah memperhatikan skala usaha anggota yaitu dengan adanya sistem kuota dan konsinyasi yang memberikan keleluasaan bagi anggota untuk memilih sistem pemasaran produk yang cocok bagi kondisinya, (5) Ketersediaan modal karena mendapat hibah 1 Milyar rupiah dari Kementrian Koperasi dan UKM RI, (6) Ketersediaan informasi, dan (7) Ketersediaan input-input lainnya seperti

energi, bahan baku, dll. Keenam faktor penghambat dan tujuh faktor pendorong tersebut sudah saatnya dipertimbangkan oleh pengelola koperasi agar Koperasi INTAKO bisa efektif melakukan pemberdayaan pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo.

Formulasi Model Pemberdayaan Koperasi INTAKO yang Efektif pada UMKM

Model pemberdayaan yang efektif pada UMKM adalah sebuah model pemberdayaan yang dapat menjadikan UMKM tersebut mandiri dan berdaya saing dengan tujuan agar pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya secara mandiri serta memiliki daya saing sehingga UMKM bisa eksis dan terhindar dari kemiskinan bahkan dapat membantu orang disekitarnya terhindar dari kemiskinan.

Penerapan pendekatan pemberdayaan 5P Edi Suharto (2010: 67-68) sebaiknya dilakukan sehingga didapatkan model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif yaitu:

- a) Pemungkinan dalam model pemberdayaan Koperasi INTAKO terdapat pada bentuk kelembagaan yang dipilih sebagai badan usaha yaitu koperasi sehingga menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi anggotanya dapat berkembang secara optimal dan mampu membebaskan anggotanya dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Koperasi INTAKO sebagai wadah yang dipilih oleh pengrajin di sentra tas dan koper Tanggulangin memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap anggotanya baik itu anggota dengan skala mikro, kecil maupun menengah.
- b) Penguatan yang diberikan kepada Koperasi INTAKO adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya. Pelatihan dan pendidikan yang sering dilakukan adalah berupa pelatihan manajemen, pola, desain, teknik produksi, IT, dan kesehatan. Proses penguatan yang diberikan kepada anggota oleh Koperasi INTAKO bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki anggota dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi penguatan yang diberikan belum maksimal karena *progress* yang dihasilkan

tidak semuanya bagus sehingga diperlukan proses pendampingan setelah adanya pelatihan tersebut. Sehingga sesuai dengan konsep pemberdayaan yang harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka;

- c) Perlindungan yang diberikan oleh Koperasi INTAKO kepada anggota adalah dalam hal pemberian fasilitas pinjam bahan sehingga anggota yang memiliki modal terbatas tidak mengalami kesulitan dalam melakukan ekspansi produk atau jika ada pesanan dalam jumlah besar sehingga mereka bisa bersaing dengan pelaku usaha menengah atau usaha besar sekalipun. Selain itu perlindungan lain yang diberikan adalah adanya sistem kuota dan konsinyasi yang diterapkan pada anggota dalam menitipkan produknya. Sistem tersebut memberikan keleluasaan bagi anggota untuk memilih sistem pemasaran produk yang cocok bagi kondisi usahanya. Kemudahan fasilitas tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh koperasi INTAKO kepada anggotanya agar pelaku usaha mikro dan kecil tidak tertindas oleh pelaku usaha menengah.
- d) Penyokongan yang diberikan oleh Koperasi INTAKO kepada anggotanya adalah fasilitas permodalan terutama bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pilihan lain untuk mencari pinjaman baik kepada bank/ KUR/ LKM lainnya karena persyaratan lain yang belum mencukupi, misalnya legalitas dan agunan yang ada. Dengan adanya sokongan modal dari KSP INTAKO dapat membantu anggota terutama pelaku usaha mikro untuk kelancaran usahanya. Penyokongan menurut Suarto (2010) seharusnya juga memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Penyokongan yang diberikan oleh Koperasi INTAKO masih belum maksimal terutama dalam hal pemberian bimbingan dan dukungan kepada anggota akan adanya kebijakan baru yang diterapkan Pemerintah yang berdampak pada kondisi usaha anggota. Misalnya saja, adanya kebijakan MEA ini seharusnya disikapi oleh Koperasi INTAKO dengan memberikan bimbingan teknis untuk meningkatkan

ketrampilan atau mencari strategi lain untuk menghadapi MEA. Selain itu juga memberi dukungan moril kepada anggota agar mereka siap secara mental untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga tujuan pemberdayaan bisa tercapai.

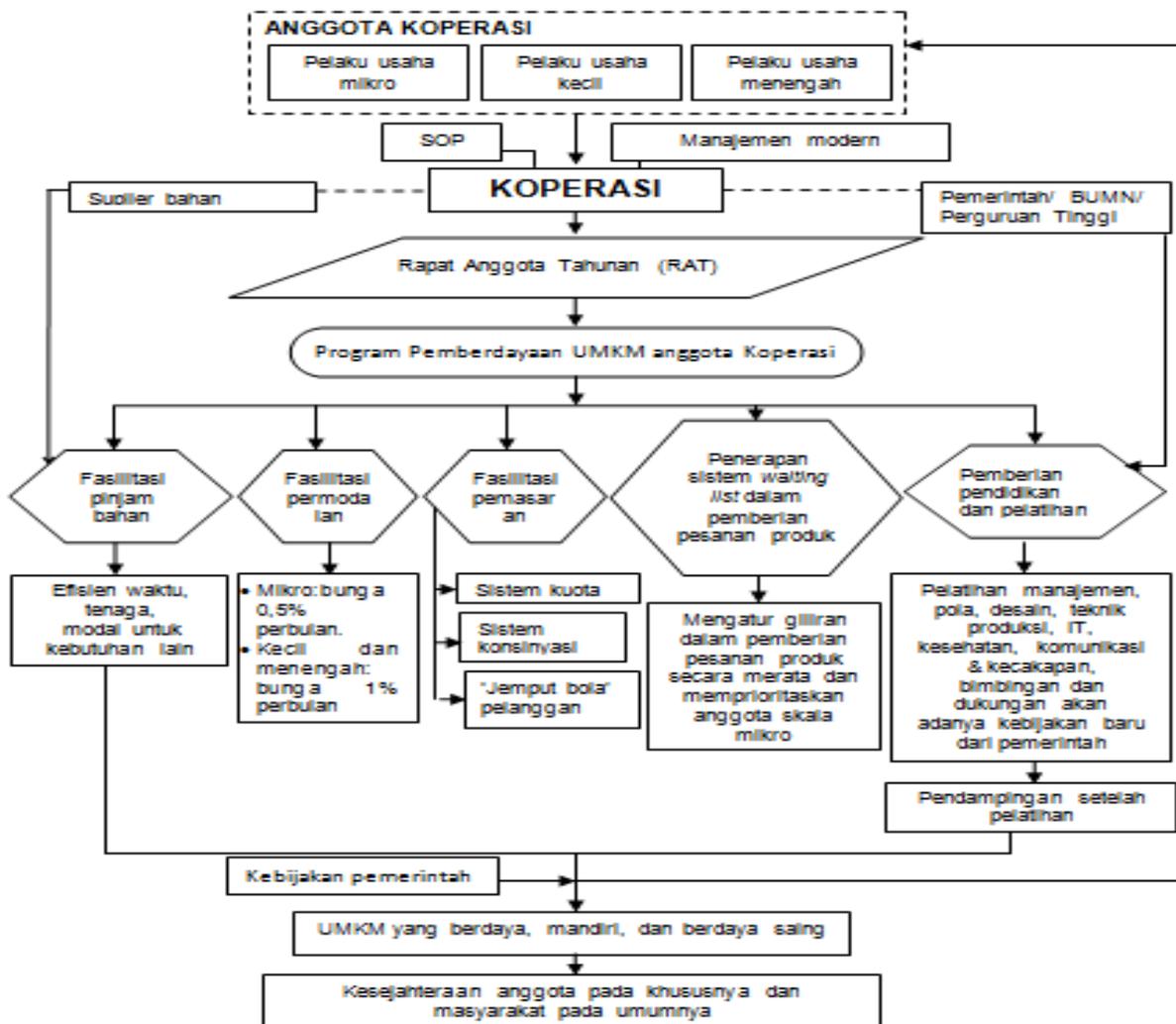
- e) Pemeliharaan yang dilakukan oleh Koperasi INTAKO terhadap anggotanya adalah dengan penerapan sistem *waiting list* dalam pemberian pesanan produk dari koperasi kepada anggota. Apabila Koperasi INTAKO mendapatkan pesanan lepas maka pengurus yang menentukan siapa yang akan mengerjakan pesanan tersebut dengan menggilir rata pada semua anggota. Sistem tersebut digunakan untuk memelihara kondisi antar anggota serta antara anggota dengan Koperasi INTAKO agar tetap kondusif sehingga tidak terjadi konflik dan adanya pemerataan bagi anggota. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Akan tetapi, bagi pelaku usaha mikro yang sangat bergantung dari pesanan produk dari koperasi perlu mendapatkan prioritas terlebih dahulu dalam antrian list tadi sehingga pelaku usaha mikro ini tidak terjebak dalam perangkap kemiskinan.

Selain itu, perlu adanya modifikasi pada berbagai program yang selama ini dijalankan oleh Koperasi INTAKO sebagai bentuk pemberdayaan kepada anggotanya yaitu (1) fasilitasi permodalan, sebaiknya ada perbedaan kebijakan pemberian bunga untuk pelaku usaha mikro misalnya hanya 6%. Hal ini karena mereka ini perlu bantuan lebih agar bisa keluar dari perangkap kemiskinan dan menjadi berdaya; (2) fasilitasi pemasaran misalnya “jemput bola” pelanggan atau strategi lain sehingga anggota tidak ragu memasarkan produknya melalui Koperasi INTAKO; (3) Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada anggota seharusnya perlu pendampingan dan monitoring dari pengurus sehingga pemberian pelatihan tidak sia-sia. Selain itu, pemberian pelatihan ketrampilan juga harus diberikan dalam hal kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi dalam hal ini menyampaikan pendapatnya pada RAT karena tidak semua anggota mempunyai kemampuan tersebut sedangkan pada saat RAT, anggota dituntut

untuk memberikan suara dan pendapatnya demi kemajuan koperasi; (4) Sebaiknya pengurus mendahulukan pemberian pesanan tersebut kepada pelaku usaha mikro karena mereka terperangkap dalam kemiskinan. Mereka sudah tidak membuat produk lagi karena sepi pasar.

Berbagai program yang dimodifikasi tersebut merupakan sebuah formulasi yang didapat dari kajian empirik. Selain itu, dalam sebuah koperasi kesepakatan anggota dalam perumusan program maupun kebijakan lain adalah sangat penting terutama dalam RAT. Pengurus harus bersikap adil, tidak memihak dan menganggap suara seluruh anggota adalah sama dan penting. Yang menentukan dalam pengambilan sebuah keputusan adalah keputusan yang benar. Komunikasi untuk mencapai kesepakatan tersebut seperti teori tindakan komunikatif Habermas dalam Ritzer (2012: 495-496) menyebutkan bahwa ada situasi percakapan ideal yaitu kekuatan atau kekuasaan tidak

menentukan argumen mana yang menang; sebaliknya yang muncul sebagai pemenang adalah argumen-argumen yang lebih baik. Selain itu, manajemen koperasi yang tidak transparan dan prosedural juga menjadi faktor penghambat dalam efektifitas model pemberdayaan Koperasi INTAKO sehingga perlu membuat SOP bagi setiap prosedur di koperasi sehingga pekerjaan pengurus yang juga merangkap sebagai manajer menjadi jelas. Hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat. Setiawan, Lukman (2014; 3) menjelaskan bahwa SOP merupakan rangkaian aturan yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk direktif meliputi semua aspek sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara konsisten. Dari analisis tersebut formulasi model pemberdayaan yang diajukan oleh penulis dapat digambarkan seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Gambaran Model Pemberdayaan Koperasi

KESIMPULAN

Model pemberdayaan yang ditemukan di Koperasi INTAKO pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo sudah menggunakan prinsip partisipatoris dan berbasis pada *people centered development*. Akan tetapi program pemberdayaan yang dijalankan masih belum maksimal terutama dalam hal pemasaran, manajemen serta dalam penyokongan pada UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas model pemberdayaan Koperasi INTAKO pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo yang menjadi penghambat adalah adanya kebijakan makro dari Pemerintah yang tidak berpihak pada UMKM, adanya bencana lumpur lapindo di Tahun 2006, adanya persaingan produk – produk sejenis terutama di kawasan sentra industri tas dan koper Tanggulangin, sistem di Koperasi INTAKO yang tidak transparan dan prosedural, adanya konflik antar anggota sehingga menyebabkan tidak adanya homogenitas kepentingan anggota, dan keterbatasan SDM meliputi keahlian atau tingkat pendidikan pekerja dan keahlian pengelola koperasi. Sedangkan untuk faktor pendorong yaitu wadah kelembagaan yang dipilih oleh UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin adalah koperasi, pendirian Koperasi INTAKO sudah pada tahap emansipatif dalam sebuah proses pemberdayaan dan menggunakan paradigma *people centered development*, aturan, visi, dan misi Koperasi INTAKO dibuat atas dasar kesepakatan anggota pada waktu RAT, sistem penerimaan produk barang jadi sudah memperhatikan skala usaha anggota yaitu dengan adanya sistem kuota dan konsinyasi, Ketersediaan modal, ketersediaan informasi, dan input-input lainnya seperti energi, bahan baku, dll. di Koperasi INTAKO.

Formulasi model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif pada UMKM adalah

memodifikasi program kegiatan yang selama ini dijalankan oleh Koperasi INTAKO, perbaikan dalam hal manajemen dan pemasaran agar dapat menjadikan UMKM anggota koperasi mandiri dan berdaya saing sehingga terhindar dari kemiskinan. Modifikasi program dilakukan pada fasilitasi permodalan, pemasaran, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada anggota, dan penerapan sistem *waiting list* dalam pemberian pesanan produk dari koperasi kepada anggota. Selain itu pengurus harus bersikap adil, tidak memihak dan menganggap suara seluruh anggota adalah sama dan penting, Selain itu perlunya manajemen yang transparan dan prosedural, yaitu dengan membuat SOP bagi setiap prosedur di koperasi untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang terpusat.

Dari hasil penelitian ini kami menyarankan kepada Kepala Negara dan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijakan makro sebaiknya membuat kebijakan yang mendukung program pemberdayaan untuk UMKM karena peranan UMKM dalam pencegahan kemiskinan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang berpihak pada UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, kami sampaikan juga terima kasih kepada pelaku UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo serta Koperasi INTAKO atas *sharing* informasinya sehingga dapat disusun formulasi model pemberdayaan Koperasi INTAKO yang efektif pada UMKM di sentra industri tas dan koper Tanggulangin Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus P, erwin. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah*. Jurnal FISIP ISSN 1410-4946, volume 10, nomer 3.
- Anonim. 2008. Undang-undang No.20 Tahun 2008

- _____. 2011. Perda Jawa Timur No.6 Tahun 2011
- _____. 2012. Buku 3F *Penyusunan Peranan PDRB UKM Jawa Timur Tahun 2012*.

- Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPS Provinsi Jawa Timur.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES. Bandung
- Fujikake. 2008. *Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment*. Japanese Journal of Evaluation Studies, volume 8, nomer 2, pp 25-37.
- Habermas, Jurgen. 2010. *Teori Tindakan Komunikatif Buku Satu Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Kreasi Wacana. Jakarta.
- Korten, David. 2001. *Menuju Abad ke-21*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Milles, M.B, Hubermas, M.A, and Sadana Johny. 2014. *Qualitative Data Analysis 3rd Edition*. Sage Publication. USA.
- Mubyarto. 2003. "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Rakyat Tahun II No.2*, April 2003. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_14/artikel_4.htm diakses pada tanggal 31 Mei 2014.
- Priyono, Onny S dan Pranarka, A.M.W. 1996. *PEMBERDAYAAN Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*. Center For Strategies and International Studies. Jakarta.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Setiawan, Lukman. 2014. *Rahasia membangun SOP Standart Operating Procedure Tepat*. Insan Cendekia. Surabaya.
- Soenyono. 2012. *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)*. Jenggala Pustaka Utama. Surabaya.
- Subandi. 2010. *Kedudukan dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM*. www.smeccda.com/.../jurnal/9%20Jurnal_pemberda... diakses pada tanggal 22 November 2014
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. IDEA. Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong dan Karnaji. 2012. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Tambunan, Tulus T. H. 2009. *UMKM DI INDONESIA*. Ghalia Indonesia. Bogor.